



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Bensin Eceran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat tinggal di rumah kontrakan milik ibu Upi Pratiwi, Dukuh xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan sekarang berdomisili di rumah orang tua Pemohon (Alm), Kp. xxx, Kecamatan Kaliwungu Utara, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah kontrakan milik ibu Upi Pratiwi, Dukuh xxx, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 06 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1988 M. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 232/87/1988 tanggal 29 Juli 1988 M;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan milik ibu Upi Pratiwi hingga bulan Maret 2002 selama 14 tahun, kemudian dikarenakan Termohon bekerja ke luar negeri (Malaysia) Pemohon dengan Termohon tinggal secara terpisah dan sekali bertemu di rumah kontrakan milik ibu Upi Pratiwi pada bulan Januari 2017, dan telah berhubungan suami isteri (bada dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2002 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon sering merasa kurang nafkah atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang diberikan rata-rata Rp. 1.500.000,- perbulan;
 - 4.2. Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sekurang-kurangnya pada bulan Januari 2017 Termohon pulang dari luar negeri dan bertemu dengan Pemohon di rumah kontrakan milik ibu Upi Pratiwi dengan membawa 4 orang anak;
6. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2017 hal tersebut yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah tanpa berkomunikasi selama 5 (lima) tahun lamanya;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (Alm) sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan milik ibu Upi Pratiwi,;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324082002620001 tanggal 22 JUNI 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Nomor 232/87/1988 tanggal 29 Juli 1988, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

2. xxx, umur 57 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal kakak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 6 tahun yang lalu
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan, namun belum dikaruniai anak,
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang nafkah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2002 Termohon pergi bekerja ke luar negeri
- Bahwa pada awal tahun 2017 Termohon datang menemui Pemohon dengan membawa 4 orang anak dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



3. xxx, umur 45 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 6 tahun yang lalu
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan, namun belum dikaruniai anak,
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak sekitar tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang nafkah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2002 Termohon pergi bekerja ke luar negeri
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon datang menemui Pemohon dengan membawa 4 orang anak dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, ternyata perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari' :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Jo. SEMA No. 3 tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa putusan verstek dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian harus dengan pembuktian, oleh karenanya majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 1988 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon bahwa sejak awal tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang nafkah, sejak tahun 2002 Termohon pergi bekerja ke luar negeri dan pada awal tahun 2017 Termohon datang menemui Pemohon dengan membawa 4 orang anak dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 tahun dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama lagi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pemohon bahwa sejak tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang nafkah, sejak tahun 2002 Termohon pergi bekerja ke luar negeri dan pada tahun 2017 Termohon datang menemui Pemohon dengan membawa 4 orang anak dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 tahun, selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sejak tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang nafkah, sejak tahun 2002 Termohon pergi bekerja ke luar negeri dan pada tahun 2017 Termohon datang menemui Pemohon dengan membawa 4 orang anak dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 tahun, selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 1988 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
2. sejak tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang nafkah, sejak tahun 2002 Termohon pergi bekerja ke luar negeri;
3. pada tahun 2017 Termohon datang menemui Pemohon dengan membawa 4 orang anak dan terjadi pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 5 tahun, selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemudharatan kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21);

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

1. Al-Quran (Al-Baqarah 227) yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

2. Kaidah fiqih yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	415.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 426/Pdt.G/2023/PA.Kdl